

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Djoko Sumaryanto. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: UBHARA Press.
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Cet. II. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ayu Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Cet. I. Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Extrix Mangkeprijanto. 2019. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Cet. I. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Irwansyah. 2021, *Penelitian Hukum, Penelitian Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Cet. IV. Ed. Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Joko Sriwidodo. 2019. "*Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*". Cet. I. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari. 2022. *Hukum Pidana Materil*. Cet. I. Jakarta: KENCANA.
- Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Cet. I. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet IX, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muntaha. 2017. *Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017, *Penelitian Hukum*, Cetakan XIV, Ed. Revisi, Jakarta: Kencana.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Cet. I. Yogyakarta: Deepublish.
- Takdir. 2013. "*Mengenal Hukum Pidana*". Cet. I. Edisi Pertama. Palopo: Laskar Perubahan.
- Tofik Yanuar Chanda. 2022. *Hukum Pidana*. Cet. I. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi & Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI RI Semarang Press.

Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

- Ahmad Bardi, Ernawati, Bq. Aula Permata Mulia. 2024. *Analisis Yuridis Penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Menyebabkan Kematian*. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah. Volume 4 Nomor 1. CV. Ulil Albab Corp.
- Anak Agung Gede Agung, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widyantara. 2021. *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa*. Jurnal Interpretasi Hukum. Volume 2 Nomor 1. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Bali.
- Anselmus S. J. Mandagie. 2020. *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11*

- Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lex Crimen. Volume 9 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Samratulangi.
- Arya Bagus Wardhana. 2015 *Makna Yuridis Kegoncangan Jiwa Yang Hebat Dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP Berkaitan Dengan Tindak Pidana Penganiayaan*, Brawijaya Law Student Journal, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Bastianto Nugroho. 2017. *Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHP*. Yuridika. Volume 32 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Diane J. A. Lendo. 2018. *Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Pembena Sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lex Crimen. Volume 7 Nomor 2. Fakultas Hukum Unsrat.
- Elvira Puspa Anggraeni dan Ahmad Mahyani. 2022. *Noodweer dan Noodweer Exces Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*. Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Volume 2 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Bureaucracy Journal, Surabaya.
- Fergio Rizky Refin dan Salman daffa' Nur Azizi. 2023. "Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces)". Jurnal Justitia Fundamental JUSTICE. Volume 4 Nomor 2.
- I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M., Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika Mangku. 2020. *Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No. 124/Pid.B/2019/PN.Sgr)*. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 3 Nomor 1.
- Iman Baihaqi, M. Taufik Makarao, Siti Nur Intihan, 2024. *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana*. Jurisdiction. Volume 6 Nomor 2. Universitas As-Syafi'ah.
- Ketut Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yulianti. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*. e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 3 Nomor 2.
- Margaret Mutiara Manurung dan Ade Adhari. 2024. "Analisis Pembelaan Terpaksa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61 K/Pid/2020", Unes Law Review, Volume 6 Nomor 4, Faklta Hukum Universitas Ekasakti, Padang.
- Nurul Qomaril Afifah. 2021, *Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Menderita Skizofrenia Paranoid (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 K/MIL/2018)*, Jurnal Verstek, Volume 9 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Rani Angela gea, et.al. 2016. *Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan*. USU Law Journal. Volume 4 Nomor 4.
- Rianda Prima Putri. 2019. *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Ensiklopedia Social Review. Volume 1 Nomor 2. Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia.

- Roy Roland Tabaluyun. 2015. "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP", Lex Crimen, Volume 4 Nomor 6, Fakultas Hukum Unsrat, Manado.
- Totok Sugiarto, Wawan Susilo, Purwanto. 2022. *Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam. Volume 25 Nomor 2. Universitas Panca Marga.
- Wenlly Dumgair. 2016. *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana*. Lex Crimen. Volume 5 Nomor 5. Fakultas Hukum Unsrat.
- Yosua S. V. Tampi, Olga A. Pengkereggo Hironimus Taroreh. 2020. *Melaksanakan Ketentuan Undang –Undang Sebagai alasan Penghapus Pidana Berdasarkan Pasal 50 KUHP*. Lex Privatum. Volume VIII Nomor 4. Fakultas Hukum Unsrat.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Lahe Regina Patricia. 2017. *Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Samratulangi.
- Muhammad Syafiq Amrullah. 2024. *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Pembunuhan dengan Sengaja (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Soe)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nyimas Sari Nurjihan. 2024. *Pembuktian Unsur Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Pada Tindak Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/Pn Dgl)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Sumber Internet

- Annisa Medina Sari. 2023. diakses pada 9 Maret 2024 pukul 2.46 WITA. "Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya". <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>.
- Dian Dwi Jayanti. 2023. diakses pada 26 Maret 2024 pukul 12.07 WITA. "Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa sebagai Alasan Penghapus Pidana". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/daya-paksa-dan-pembelaan-terpaksa-sebagai-alasan-penghapus-pidana-lt51bd53f7b6b00/>.
- Tim Hukumonline. 2024. diakses pada 11 Maret 2025 pukul 16.06 WITA. "Visum et Repertum: Prosedur, Jenis, dan Tahapannya". <https://www.hukumonline.com/berita/a/visum-et-repertum->

[lt627c7002011d2/?page=2](https://www.hukumonline.com/berita/a/lt627c7002011d2/?page=2).

Willa Wahyuni. 2022. diakses pada 7 Mei 2024 pukul 18.11 WITA. “*Alasan Pembenaar Sebagai Penghapusan Tindak Pidana*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/lt632ae5013591c/?page=2>.

Willa Wahyuni. 2023. Diakses pada 25 November 2024 pukul 21.41 WITA. “*Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/lt63e226d22adc3/?page=2>.

Sumber-Sumber Lain

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.